

Determinan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Peningkatan Partisipasi Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa : Studi Terhadap Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2004- 2009

Angga Nurdin Rachmat¹, Kristyono Ratmoko^{2,*}

¹Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unjani

²Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unjani

E-mail korespondensi: angga.nurdin@lecture.unjani.ac.id

Abstract—Indonesia under Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) presidency tend to put Peacekeeping Operation as important instrument for foreign policy. The evidence of this phenomenon is the policy of SBY to increase Indonesia participation at UN PKO, the goal is to make Indonesia as Top Ten Troops Contribution Countries in 2019. This ambition reflection a vision of Indonesia government to look more active in international affairs by contribution to maintain international peace. But at other side, Indonesia defence spending is more than enough to meet minimum routine requirement and Indonesia Army still have negatif opinion for human right violation during Orde Baru regime. This research attempt to discuss the reason behind SBY policy to increase Indonesia participation on UNPKO and make Indonesia as Top Ten UN PKO TCC. The research will use theory of foreign policy determinant by Rossenau to find out the reason that drive SBY to make that policy. Those determinant not only will find at international level and but also at domestic level.

Keyword— Domestic level; International level; UNPKO

I. PENDAHULUAN

Keikutsertaan Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian telah dimulai pada tahun 1957 dalam misi perdamaian di Mesir dengan mengirimkan 557 personil [1]. Sejak keterlibatan dalam misi perdamaian di Mesir, pemerintah Indonesia terlibat dalam berbagai misi perdamaian di wilayah lain dimana pasukan penjaga perdamaian asal Indonesia dikenal dengan *Indonesian Garuda Contingent* (IGC) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kontingen Garuda (Konga). Indonesia melalui Kontingen Garuda TNI telah melaksanakan berbagai misi berbagai belahan dunia. Berbagai misi yang diikuti oleh Kontingen Garuda TNI telah mendapatkan banyak apresiasi terkait dengan kontribusi yang diberikan dalam kesuksesan setiap misi. Dimana seperti halnya kepemimpinan Indonesia dalam misi UNEF II sangat dihargai dalam menjaga terlaksananya perjanjian damai diantara Mesir dan Israel yang pada saat tersebut berkonflik.

Bagi Indonesia, kontribusi pasukan TNI dalam *peacekeeping operation* PBB sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan keamanan dan perdamaian dunia telah menjadi amanat yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4. Amanat tersebut memberikan dasar

kepada Indonesia untuk menjalankan politik luar negeri secara aktif dalam rangka ikut serta memelihara perdamaian dunia, beringan dengan kebebasan dalam menjalankan politik luar negeri tanpa terikat kepada negara lain. Salah satu bentuk dari kebijakan Indonesia untuk berkontribusi dalam penciptaan perdamaian dunia adalah dengan keterlibatan dalam pengiriman pasukan perdamaian dibawah misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa/ PBB.

Keterlibatan pemerintah Indonesia dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian mulai mengalami penurunan saat awal pemerintahan Presiden Soeharto hingga awal tahun 1990an, kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk memaksimalkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melakukan stabilisasi keamanan dalam negeri. Pada masa ini Indonesia hanya mengirimkan kontingen dalam jumlah yang tidak terlalu besar serta dengan misi yang meliputi *military observer* maupun personil pendukung lainnya.

Indonesia kembali aktif mengambil bagian dalam misi perdamaian PBB pada awal tahun 1990an di berbagai wilayah. Berdasarkan data per 31 Agustus 2016 Indonesia melalui Kontingen Garuda TNI mengirimkan sebanyak 2.840 personil yang tergabung dalam misi *peacekeeping operations* dibawah misi UNIFIL (Lebanon), UNAMID (Darfur,Sudan), MINUSCA (Repubik Afrika Tengah), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), MINUSMA (Mali), MINURSO (Sahara Barat), MINUSTAH (Haiti), UNMIL (Liberia), UNMISS (Sudan Selatan), dan UNISFA (Abyei, Sudan). Jumlah tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke 12 dari 124 negara anggota PBB yang berkontribusi terhadap *peacekeeping operation* yang digelar.

Salah satu misi perdamaian dimana Indonesia telah lama menjadi kontributor dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian adalah pada *United Nations Interim Forces in Lebanon* (UNIFIL) di wilayah Lebanon Selatan. Data yang publikasikan oleh UN *Departement of Peacekeeping Operation* (DPKO) tahun 2016 menunjukkan bahwa Indonesia berkontribusi sebanyak 1.296 personil dalam misi UNIFIL sehingga menjadi negara peringkat pertama dalam jumlah pasukan yang berkontribusi didalamnya. Saat ini Indonesia

tengah berupaya untuk meningkatkan perannya di UNIFIL. Upaya peningkatan peran Indonesia dalam UNIFIL tersebut ditunjukkan dengan pengiriman kapal perang untuk bergabung dalam *UNIFIL Maritime Task Forces*.

Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menempatkan misi pemeliharaan perdamaian PBB menjadi sebuah kebijakan strategis. Hal ini dibuktikan dalam tulisan [2] yang menyebutkan bahwa beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia yang diantaranya adalah dengan mendirikan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian – Tentara Nasional Indonesia (PMPP – TNI) di Sentul Bogor sebagai badan untuk mempersiapkan pasukan pemelihara perdamaian Indonesia sesuai dengan permintaan PBB. Pembentukan PMPP – TNI merupakan sebuah bukti keseriusan dari Indonesia dalam rangka meningkatkan kesiapan dari personil yang akan menjadi bagian dari misi pemeliharaan PBB.

Disamping itu Indonesia berupaya untuk meningkatkan posisinya sebagai TCC di PBB dengan tujuan untuk masuk dalam top ten *Troops Contribution Countries* (TCC) dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Untuk mewujudkan target tersebut Indonesia menargetkan 4.000 personil yang akan dikirimkan sebagai bagian dari misi pemeliharaan perdamaian PBB pada tahun 2019 [3] dan [4]. Keinginan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia menginginkan peran yang lebih besar dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Meskipun dalam mewujudkan keinginan tersebut tidak akan menjadi sesuatu hal yang mudah terkait dengan permasalahan yang harus dihadapi oleh Indonesia maupun TNI. Kendala utama yang harus dihadapi oleh Indonesia adalah keterbatasan anggaran pertahanan, seperti yang diketahui bahwa anggaran pertahanan Indonesia masih berada pada posisi dibawah 1% dari GDP. Karena meskipun menggunakan dana yang diberikan PBB dalam melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian, Indonesia menggunakan sistem wetlist yang artinya dana operasional akan di tanggung oleh Indonesia sebelum dilakukan reimburs oleh PBB. Permasalahan lain adalah masih tingginya sorotan internasional terhadap TNI terkait dengan tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan pada saat melaksanakan operasi militer di Aceh dan Papua.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan Mengapa Pemerintah Indonesia pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan terkait peningkatan partisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Periode 2004-2009?. Pertanyaan ini akan dijawab dengan menggunakan dasar teori yang dikemukakan oleh James Rosseau mengenai determinan kebijakan luar negeri. Penelitian ini menempatkan ambisi dari Presiden SBY untuk meningkatkan partisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai sebuah bentuk kebijakan luar negeri yang tidak akan lepas dari input dalam sebuah proses perumusan kebijakan.

II. METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena permasalahan yang dibahas terkait dengan determinan dalam pengambilan kebijakan luar negeri merupakan suatu permasalahan yang kompleks, holistik dinamis dan penuh makna sehingga tidak memungkinkan

untuk menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan penelitian ini akan dikumpulkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini merujuk kepada Bogdan dan Taylor dalam [5] akan diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik dan memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Dengan pendekatan penelitian ini maka, peneliti melakukan menginterpretasikan makna data yang diperoleh dari para informan sebagai dasar untuk melakukan analisis dalam pembahasan.

III. HASIL DAN DISKUSI

A. Indonesia dan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB

Kontingen Garuda atau yang lebih dikenal dengan sebutan KONGA merupakan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pasukan Kepolisian Indonesia yang ditugaskan oleh Negara sebagai pasukan perdamaian di negara-negara luar. Indonesia ikut serta dalam mengirimkan pasukan perdamaianya dimulai pada tahun 1957 yang pada saat itu Indonesia merupakan anggota dari PBB dan pasukan perdamaian Indonesia pun bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB.

Pada saat Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan setahun setelah itu tepat pada tanggal 18 Agustus 1946 Mesir yang mengadakan sidang menteri luar negeri dengan Negara-negara Liga Arab menetapkan resolusi mengenai pengakuan kemerdekaan Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Pengakuan Negara-negara Liga Arab atas kemerdekaan Indonesia secara langsung disampaikan oleh perwakilan Konsul Jenderal Mesir yang diutus untuk pergi ke Indonesia untuk menyampaikan pengakuan tersebut langsung kepada Presiden Soekarno dan Bung Hatta tepat pada tanggal 15 Maret 1947, dan pengakuan tersebut merupakan pengakuan pertama atas kemerdekaan Indonesia oleh Negara asing.

Setelah adanya pengakuan yang dilakukan Negara-negara Liga Arab terhadap Indonesia, hubungan Indonesia dengan Negara-negara Liga Arab semakin membaik. Hal ini pun terlihat pula pada perdebatan yang terjadi di forum Majelis Umum PBB dan Dewan keamanan PBB yang membicarakan mengenai sengketa Indonesia-Belanda, pada saat itu para diplomat Arab selalu mendukung Indonesia. Ketika Konflik Arab-Israel terjadi dan membuat Negara-negara barat masuk dalam konflik tersebut, yang kemudian dalam konflik tersebut membuat Majelis Umum PBB memutuskan penarikan mundur pasukan Inggris, Prancis serta Israel dari wilayah Palestina, presiden Indonesia yang pada saat itu sedang mengunjungi Mesir dan Arab Saudi mendukung keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB. Dukungan Indonesia terhadap keputusan Majelis Umum PBB tersebut merupakan cara Indonesia membalas pembelaan Negara-negara Arab pada saat terjadinya forum internasional yang membicarakan sengketa Indonesia-Belanda.

Indonesia secara resmi menjadi anggota ke 60 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 28 September 1950.90 Dengan keikutsertaan Indonesia menjadi anggota PBB, dalam misi pemeliharaan perdamaian Indonesia telah banyak berkontribusi dalam pasukan pemelihara perdamaian dengan dimulai pengiriman pasukan perdamaian yang bertugas di Mesir. Keikutsertaan Indonesia mengirimkan

pasukan perdamaianya bergabung dengan pasukan perdamaian PBB terdapat pula faktor yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.....”, serta dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan pula bahwa “.....ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....” Dengan adanya pembukaan UUD 1945 tersebut, maka Indonesia mendukung adanya perdamaian dunia.

Indonesia mengirimkan pasukan perdamainnya yang dinamakan dengan Kontingen Garuda yang bergabung dalam pasukan penjaga pemelihara perdamaian PBB diawali dengan pengiriman pasukan TNI pria saja. PBB melalui *The Department of Peacekeeping Operations* meminta kepada seluruh anggota PBB untuk dapat mengirimkan pasukan perdamaianya lebih di tingkatan termasuk pula pada pengiriman pasukan perdamaian wanita, hal itu disebabkan karena PBB melihat bahwa peran wanita dalam perdamaian sangat dibutuhkan serta dengan dikeluarkannya resolusi DK PBB 1325 tahun 2000 mengenai Women Peacekeeping, PBB berharap setiap anggota PBB dapat pula meningkatkan pasukan wanita perdamaian untuk bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian pria.

Dikeluarkannya Resolusi DK 1325 oleh PBB mengenai *Women, Peace and Security* pada tahun 2000 dan Indonesia ikut serta menandatangani resolusi tersebut. Maka pada tahun 2008 Indonesia mengirimkan pasukan Wanita TNI untuk ikut bergabung dengan pasukan pemelihara perdamaian untuk pertama kalinya. Penempatan Pasukan UNIFIL pada tahun 2009 yang terdiri dari Negara Polandia, Italia, Indonesia, India, Polandia, Jerman, Malaysia, Prancis, Spanyol, China, Turki dan Nepal. Dan di tahun 2009 tersebut pasukan Wanita TNI bergabung sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian pada periode kedua dengan pasukan UNIFIL. Pada tahun 2010, Indonesia mengirimkan kembali pasukan Kontingen Garuda yang akan bergabung dengan pasukan UNFIL di Lebanon.

B. Faktor Eksternal : Dinamika Sistem Internasional.

Faktor sistemik merupakan sebuah keterkaitan antara aktor dalam hubungan internasional yang akan menentukan tindakan yang diambil secara resiprokal. Dalam konteks sistemik kebijakan sebuah negara akan ditentukan oleh tindakan dari negara lain [6]. Sebuah negara akan membentuk pandangan atas kebijakan yang diambil ataupun akan diambil negara-negara lain sehingga negara harus memberikan perhatian serta respon atas lingkungan internasionalnya.

Bagi Indonesia kontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB merupakan instrumen kebijakan luar negeri yang sangat penting hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh [3] secara eksplisit menemukan bahwa misi tersebut adalah bagian dari pelaksanaan kebijakan luar negeri bagi Indonesia. Ambisi untuk meningkatkan peringkat Indonesia sebagai TCC dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB jika didasarkan pada faktor sistemik dalam perumusan kebijakan luar negeri maka merupakan bagian dari bagaimana Indonesia merespon perubahan yang terjadi dalam dinamika hubungan antar negara maupun aktor-aktor lain dalam

lingkungan strategis hubungan internasional Indonesia itu sendiri.

Awal millennium baru dunia memberikan perhatian terhadap kampanye yang digagas Amerika Serikat (AS) untuk perang melawan terorisme sebagai dampak dari serangan yang diterima negara tersebut dalam peristiwa 9-11. Kampanye ini memunculkan kembali perilaku unilateralisme AS untuk menunjukkan kapasitas sebagai negara superpower yang membawa gerbong negara-negara sekutunya untuk juga tampil sebagai penjaga serta pengawas keamanan dunia. Hal ini ditunjukkan dengan invasi yang dilakukan oleh AS dan negara-negara sekutunya ke Afghanistan dan Irak dengan mengukung kampanye tersebut. Disisi lain Indonesia baru saja memasuki era baru dalam proses demokratisasi serta pemulihan pasca krisis yang masih menyibukan diri dengan pembenahan internal. Oleh karena itu Indonesia dituntut untuk dengan segera memulihkan citra maupun eksistensi sebagai negara yang juga memikul tanggungjawab dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dunia.

Tanggungjawab tersebut merupakan komitmen yang tidak dapat dilepaskan dari Indonesia sebagai sebuah negara yang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV menyebutkan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Implementasi dari hal tersebut kemudian terimplementasi dalam kontribusi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Tidak seperti AS dan negara-negara sekutu yang lain dasar dari Indonesia terlibat dalam memelihara keamanan dan ketertiban dunia memiliki tujuan yang mulia serta mengedepankan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan senantiasa menjadi dasar bagi upaya Indonesia dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dunia. Dimana pada awal millennium baru, masih terdapat beberapa konflik yang berpotensi tidak hanya berdampak pada keamanan dan stabilitas internasional namun lebih dari itu berpotensi menimbulkan bencana kemanusiaan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang memadai untuk meningkatkan kapasitas dari kontingen yang terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian yang digelar oleh TNI.

Dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas personil Presiden SBY kemudian membangun sebuah pusat pelatihan terpadu yang berlokasi di Sentul Bogor yakni Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP). Pembangunan fasilitas tersebut menunjukkan sebuah komitmen kuat bahwa dalam mencapai ambisi untuk masuk dalam sepuluh besar TCC PBB tidak hanya bertumpu kepada jumlah namun juga pada kemampuan yang dimiliki oleh personil asal Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Disamping itu komitmen Indonesia tersebut ditujukan untuk membangun kesadaran negara-negara lain bahwa upaya untuk berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian juga merupakan bagian dari penguatan persahabatan antar negara ditengah adanya dualisme pandangan terkait isu terorisme serta tindakan unilateral AS dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kongo yang masih berkebutakan dengan perang saudara, dimana Indonesia secara reguler menempatkan pasukan pemelihara perdamaian dibawah payung PBB masih sulit untuk menemukan titik terang penyelesaian. Meskipun tidak

mengirimkan kontingen dalam jumlah yang signifikan dalam misi tersebut, namun Kontingen Garuda senantiasa memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas keamanan dinegara tersebut serta keselamatan dari warga sipil yang berada ditengah-tengah konflik. Konflik berkepanjangan di Kongo tentu akan berimbas kepada stabilitas dikawasan Afrika yang sangat rentan akan konflik antar kelompok. Meskipun secara geografis berjauhan dengan Indonesia, namun dalam konteks tersebut, permasalahan yang terjadi di Kongo harus dikelola dengan baik sehingga tidak akan menimbulkan bencana kemanusiaan dalam ruang lingkup lebih luas.

Sementara di Timur Tengah, Israel kembali melakukan invasi terhadap wilayah Lebanon Selatan dalam upaya untuk menghancurkan basis Hizbullah pada tahun 2006. Konflik yang terjadi di Lebanon Selatan pada tahun 2006 menjadi titik awal bagi Indonesia untuk memberikan kontribusi lebih dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Presiden SBY kemudian melihat bahwa konflik di Lebanon Selatan akan membawa dampak yang sangat luas bila tidak segera ditangani. Terlebih ditengah ketidakpedulian dari kekuatan besar seperti AS maupun negara-negara Arab terhadap agresi yang dilakukan Israel serta penderitaan warga Lebanon Selatan. Dalam misi yang digelar dibawah bendera UNIFIL II, Indonesia menjadi negara terbesar yang mengirimkan kontingen pasukan pemelihara perdamaian dengan jumlah kurang lebih 1000 personil.

Gelar personil yang cukup besar menjadikan indikator penting dan konkrit dari peran suatu negara dalam memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sedangkan dalam konteks nasional, keterlibatan tersebut merupakan sarana peningkatan profesionalisme individu dan organisasi yang terlibat secara langsung dalam penggelaran operasi internasional. Pesan ini yang kemudian ingin disampaikan oleh Indonesia sebagai sebuah kebijakan luar negeri dalam menanggapi kebijakan luar negeri dari negara lain yang cenderung lebih memilih untuk mengejar kepentingan unilateral serta pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

C. Faktor Internal.

Faktor internal dalam perumusan kebijakan luar negeri, merupakan serangkaian dari dinamika politik domestik yang menjadi pertimbangan sebuah kebijakan dibuat. Kebijakan luar negeri tidak lain merupakan kepanjangan tangan dari politik domestik sehingga kebijakan luar negeri juga akan menjadi cerminan dari kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan oleh aktor-aktor didalam negeri. Termasuk kebijakan luar negeri Indonesia yang tercermin dalam peningkatan kontribusi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB juga tidak lepas dari warna dinamika politik domestik yang terjadi pada saat tersebut yang diantaranya meliputi :

Birokrasi Pemerintahan

Birokrasi akan memberikan warna dalam pengambilan kebijakan luar negeri, selayaknya yang dikemukakan oleh Rossenau. Kondisi ini membawa pada keterlibatan para birokrat dalam pemerintahan untuk mempengaruhi kebijakan dan tidak memberikan fokus terhadap pusat pembuatan kebijakan luar negeri. Dengan demikian maka para birokrat memiliki banyak pengaruh dalam perumusan kebijakan luar negeri. Demikian pula dalam konteks pengambilan kebijakan

luar negeri yang diteliti dalam penelitian ini terkait dengan ambisi untuk meningkatkan postur Indonesia sebagai Top Ten TCC UNPKO pada masa pemerintahan Presiden SBY.

Faktor birokrasi dalam pemerintahan SBY sebagai determinan dalam menentukan kebijakan Indonesia terhadap misi pemeliharaan perdamaian PBB tidak dapat dilepaskan dari alam demokrasi dan desentralisasi dimaa akan timbul banyak pusat kekuatan yang walaupun kecil akan menjadi daya pendorong yang cukup kuat terhadap kebijakan yang diambil. Kondisi domestik yang cenderung stabil membuat bargaining terhadap para elit politik didalam negeri tidak mengalami kesulitan yang berarti. Stabilitas ini didukung pula oleh dominasi dari partai pengusung SBY yakni democrat yang mampu untuk menjaga soliditas dalam koalisi untuk mendukung kebijakan SBY khususnya terhadap misi pemeliharaan perdamaian PBB. Dimana dalam sistem pengambilan kebijakan memerlukan persetujuan dari DPR serta pertimbangan dari kementerian keuangan untuk proses pembiayaan.

Kebijakan Presiden SBY tidak dapat dilepaskan dari upaya petinggi-petinggi di jajaran TNI, khususnya TNI Angkatan Darat (AD) untuk menjadikan misi pemeliharaan perdamaian sebagai wadah untuk peningkatan kapabilitas dan perbaikan citra TNI dimata internasional. Keberadaan dari PMPP yang berada di Sentul tidak dapat dilepaskan dari lobi-lobi yang dilakukan oleh para perwira TNI sebagai bagian dari peningkatan profesionalisme TNI, khususnya dalam misi pemeliharaan perdamaian. Dalam konteks ini SBY harus mampu untuk menampung aspirasi dari kalangan TNI yang tentu sangat dominan dalam mendukung stabilitas pemerintahan serta agenda kebijakan luar negeri pada masa tersebut.

Disamping permasalahan peningkatan profesionalisme, faktor ekonomi menjadi salah satu motivasi dari kalangan elit TNI. Peningkatan jumlah personil yang dikirimkan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB akan meningkatkan kesejahteraan dari para prajurit. Kondisi ini berkaca kepada tingkat kesejahteraan prajurit yang masih belum mencapai harapan. Dengan keterlibatan personil dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB setidaknya diyakini akan membawa peningkatan signifikan terhadap kesejahteraan mereka terkait dengan sistem pembayaran yang diberikan oleh PBB. Meskipun tidak semua prajurit akan memperoleh kesempatan untuk menjadi bagian dalam misi tersebut, namun dengan peningkatan jumlah yang dicanangkan oleh pemerintah maka semakin terbuka peluang agar banyak personil yang bisa merasakan penugasan di luar negeri dalam bentuk misi pemeliharaan perdamaian.

Aktor lain yang kemudian tidak dapat dikesampingkan adalah industri-industri pertahanan yang kemudian akan memiliki andil terhadap kebijakan pemerintah SBY. Dimana Pindad sebagai produsen utama ALUTSISTA bagi TNI pada akhirnya menjadikan misi pemeliharaan perdamaian yang melibatkan kontingen Garuda sebagai ajang untuk mempromosikan berbagai produk mereka. Dengan demikian, Industri strategis akan meyakinkan pemerintah SBY untuk menempatkan misi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai bagian dari promosi untuk menarik pembeli. Upaya menarik pembeli ini harus dilakukan dengan meyakinkan bahwa produk mereka layak dan mampu beroperasi pada medan tempur serta dapat diandalkan. Atas dasar tersebut maka buka

menjadi sebuah rahasia bahwa dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya pada masa pemerintahan Presiden SBY terkait misi pemeliharaan perdamaian mengusung kepentingan dari industri strategis yang dimiliki oleh Indonesia.

Berdasarkan pada penjelasan diatas maka hal ini membuktikan apa yang dijelaskan oleh [7] bahwa politik luar negeri merupakan sebuah proses yang terkait dengan bargaining, kompromi dan penyesuaian dengan pemerintah akan dianalogikan sebagai sekumpulan individu serta organisasi. Dimana dampak yang akan muncul adalah bahwa kebijakan tidak akan dilihat sebagai sebuah produk yang didasarkan pada rasionalitas melainkan dari proses interaksi diantara para aktor yang terlibat yang dalam hal ini adalah dari kalangan partai politik pendukung yakni Partai Demokrat dan kalangan oposisi, para elit di jajaran TNI, serta industri-industri strategi dan penyesuaian dari berbagai individu yang ada pada lingkaran pemerintahan serta organisasi pemerintahan yang dibentuk untuk mendukung kekuasaan dari Presiden SBY.

Ideosinkretik

Kebijakan luar negeri tidak dapat dilepaskan pula dari gaya kepemimpinan dari seorang Presiden maupun Kepala Pemerintahan. Analisis ini menjadi salah satu faktor penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri menurut Rossenau. Meskipun demikian [8] melihat bahwa pendekatan ideosinkretik akan lebih mudah diterapkan pada pengambilan kebijakan di negara-negara yang memiliki kecenderungan otoriter. Peneliti dalam hal ini tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan tersebut, mengingat bahwa dalam negara yang demokratis seperti Indonesia, warna kebijakan luar negeri senantiasa mengusung ide maupun gagasan dari Presiden yang tengah berkuasa.

Berkaca pada argumen diatas bahwa ideosinkretik akan menjadi determinan dalam kebijakan luar negeri Indonesia dalam peningkatan kontribusi misi pemeliharaan perdamaian PBB, meskipun Indonesia buka sebagai negara otoriter dibawah pemerintahan Presiden SBY. Peningkatan kontribusi serta postur kontingen Garuda dibawah mandat PBB tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengalaman yang dimiliki oleh SBY yang pernah menjadi bagian dari personil lapangan yang terlibat dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian. SBY saat masih aktif sebagai anggota TNI pernah memperoleh kepercayaan sebagai kepala Pengamat Militer PBB merangkap komandan untuk Kontingen Indonesia yang bertugas di Bosnia, bekas pecahan Yugoslavia. Dimana pada saat itu tugas utamanya adalah untuk mengawasi gencatan senjata diantara para pihak yang bertikai di wilayah tersebut. Berdasarkan sejarah karir militer SBY terdapat dalam tulisan [9], SBY memperoleh kenaikan pangkat yang terbilang cepat dibandingkan rekan-rekan seangkatannya yakni menjadi Brigadir Jenderal TNI.

Atas pengalaman tersebut SBY melihat bahwa misi pemeliharaan perdamaian PBB mampu menjadi wadah untuk meningkatkan karir dan kompetensi dari prajurit. Meskipun demikian tidak menampilkan bahwa masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh personil TNI dilapangan dalam menjalankan tugasnya dalam misi tersebut. Oleh karena itu gagasan untuk membangun PMPP menjadi bagian dari visi yang dimiliki oleh Presiden SBY untuk mengatasi kendala tersebut. Pemikiran ini seperti yang dikutip dalam [10], muncul berdasarkan pengalaman pribadinya saat menjadi

salah satu pasukan perdamaian yang dikirim ke Bosnia. Kondisi yang ada saat itu 38 negara yang mengirim pasukannya dan disebar di enam wilayah. Indonesia pun mengirim sekitar 650 perwira. Namun sayang, dari ratusan perwira itu hanya sedikit yang menjadi pimpinan grup karena terkendala bahasa, keahlian menyeter, dan kurangnya pengetahuan soal misi perdamaian.

Keberhasilan Presiden SBY dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Pengamat Militer PBB saat aktif menjadi anggota TNI dianggap mampu untuk meningkatkan citra negara. Kondisi ini terkait dengan kemampuan dari personil yang berasal dari negara berkembang untuk memimpin kontingen dari negara-negara lain. Dalam masa kepemimpinannya Presiden SBY berusaha menggunakan karisma pribadinya dengan mengambil sebagian peran Menlu di dalam melakukan pendekatan dengan setiap mitra dialog guna memperoleh kepercayaan mereka akan keseriusan SBY di dalam memenuhi setiap komitmennya. Salah satu komitmennya adalah untuk meningkatkan keaktifan Indonesia dalam ikut memelihara ketertiban dunia yang diimplementasikan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Melalui politik luar negeri Bebas Aktif, Presiden SBY mencoba untuk melakukan pemaknaan kembali dengan mencoba untuk menekankan pada kata aktif yang diimplementasikan dengan peningkatan personil dalam misi pemeliharaan PBB serta dalam visi menjadi sepuluh besar TCC UNPKO. Penguatan atas politik luar negeri bebas aktif kemudian dituangkan dalam gagasan "*A million friends zero enemy*" ("sejuta kawan tanpa satupun lawan") dan "*all direction foreign policy*" ("politik luar negeri kesegala arah") merupakan gagasan yang digunakan SBY untuk merepresentasikan politik bebas-aktif Indonesia. Maksud dari gagasan tersebut agar Indonesia mampu mengubah musuh menjadi teman, dan mengubah teman menjadi mitra; memiliki kapasitas diplomatik, intelektual dan emosional untuk menanggapi isu-isu kebijakan luar negeri yang rumit; dan tidak mempercayai teori konspirasi, kecurigaan yang berlebihan, bersikap terlaru defensif, atau rasa takut bahwa dunia akan menguasai kita.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan tulisan ini menemukan bahwa dominasi dari faktor ideosinkretik dalam kebijakan luar negeri Indonesia terkait peningkatan kontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian tidak dapat dilepaskan dari pengalaman pribadi Presiden SBY saat masih aktif bertugas menjadi anggota TNI yang pernah menjadi Kepala Pengawas Militer bagi PBB di Bosnia. Pengalaman ini yang kemudian menjadi dasar dari berbagai gagasan dari Presiden SBY dalam mengimplementasikan gagasan-gagasan yang terkait dengan keterlibatan Indonesia dalam misi pemeliharaan PBB baik terkait dengan pengiriman personil maupun peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

V.

- [1] Dewi Fortuna Anwar, "Indonesia Peacekeeping Operations : History, Practice and Future," in *Asia Pacific Nations in International Peace Support and Stability Operations*. New York: Palgrave MacMillan, 2014.
- [2] Dafri Agussalim, *Indonesia dan Misi Perdamaian PBB : Tinjauan Diplomasi dan Politik Luar Negeri*, Dafri Agussalim, Ed. Yogyakarta:

Institute of International Studies, 2013.

- [3] Leonard Hutabarat, "Indonesia Participation in UN Peacekeeping as Instrument of Foreign Policy : Challenge and Opportunities," *Global & Strategis*, vol. VIII, pp. 99-183, 2014.
- [4] David Capie, "Indonesia as Emerging Peacekeeping Power : Norm Revisionist or Pragmatic Provider," *Contemporary Southeast Asia : A Journal of International and Strategic Affairs*, vol. 38, no. 1, pp. 1-27, 2016.
- [5] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Eds Rev.* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- [6] James D Fearon, "Domestic Politics, Foreign Policy and Theories of International Relations," *Annual Review of Political Science*, no. 1, pp. 289-313, 1989.
- [7] Peter A Toma and Robert F Gorman, *International Relations : Understanding Global Issues*. California: Broke Cole Publishing Company, 1991.
- [8] Theodore Coulumbis and James H Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power*. Bandung: Putra Abaradin, 1990.
- [9] Endah Alberthine, *Kepak Sayap Putri Prajurit*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- [10] Munawaroh. (2011, Desember) Alasan SBY Membangun Pusat Perdamaian. www.nasional.tempo.co/read/372506/alasan-sby-membangun-pusat-perdamaian/full&view=ok.